

ABSTRAK

Hak atas air diakui sebagai hak asasi manusia (HAM), sehingga negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Namun, pemenuhan hak atas air masyarakat menjadi sulit dipenuhi, yang disebabkan karena pencemaran. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai pemenuhan hak atas air masyarakat Kota Bekasi, serta upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam memenuhinya. Penelitian penulisan hukum ini menggunakan pendekatan tidak sekedar doktrinal, tetapi juga dilengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber untuk mengkonfirmasi informasi-informasi yang sebelumnya sudah diperoleh. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa pencemaran air Sungai Bekasi menyebabkan tidak terpenuhi hak atas air bagi masyarakat Kota Bekasi di Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Utara dan upaya Pemerintah Kota Bekasi memenuhi hak atas air dilakukan dengan mengeluarkan peraturan daerah terkait pencemaran air, pemberian sanksi administratif kepada industri yang mencemari Sungai Bekasi, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan pipa dan pembersihan Sungai Bekasi.

Kata kunci: Hak atas air, pencemaran air, kewajiban negara, Masyarakat Kota Bekasi dan Sungai Bekasi